

BAB 7

Menavigasi Kebijakan *Look East* melalui Diplomasi Biru

Baiq Wardhani, Sarah Anabarja, & Renatha A. Rossdiana

A. Kebijakan *Look East* Indonesia dalam Kerangka KSST

Tulisan ini menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mewujudkan kebijakan luar negeri *Look East* dengan memfungsikan diplomasi biru di wilayah regional Pasifik Selatan melalui skema Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular (KSST)¹. Bentuk kerja sama ini merupakan inisiatif Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dan pembangunan bersama antara tiga pihak, yakni negara-negara berkembang, negara maju, dan institusi multilateral, mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti pinjaman pembangunan, kerja

¹ Bantuan Indonesia ke Pasifik Selatan tidak selalu dalam bentuk KSST, ada juga bentuk bantuan bilateral langsung non-KSST.

B. Wardhani, S. Anabarja, & R. A. Rossdiana
Universitas Airlangga, *e-mail*: baiq.wardhani@fisip.unair.ac.id

© 2026 Editor & Penulis

Wardhani, B., Anabarja, S., & Rossdiana, R. A. (2026). Menavigasi Kebijakan Look East Dalam Diplomasi Biru. Dalam RR. E. Yustiningrum & E. S. Prihatini (Ed.), *Indonesia dalam Kancah Geopolitik di Indo-Pasifik* (233–271). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.2075.c1724
E-ISBN: 978-602-6303-98-1

sama sektoral, dan bantuan teknis. Bantuan Indonesia ke Pasifik Selatan mencerminkan pendekatan yang holistik dan beragam, yang tidak hanya terbatas pada bantuan finansial, tetapi juga mencakup aspek-aspek, seperti pembangunan kapasitas, dukungan teknis, dan kerja sama sektoral (Wardhani & Dugis, 2020).

Kebijakan *Look East* adalah orientasi strategis Indonesia negara dalam memperkuat hubungan dan kerja sama dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Salah satu fokus utama kebijakan ini adalah isu kemerdekaan Papua. Sejak isu tersebut disuarakan lebih gencar oleh negara-negara Pasifik, Indonesia menggunakan bantuan sebagai alat diplomasi utama untuk menangkalnya. Secara umum, kebijakan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar dan membangun citra positif di antara negara-negara Pasifik (Wardhani & Dugis, 2020). Dalam mewujudkan Kebijakan *Look East*, Jakarta memanfaatkan diplomasi biru sebagai sarana mencapai kepentingan nasionalnya di Pasifik Selatan. Penulis menggunakan istilah diplomasi biru dalam esai ini untuk menyebut bentuk diplomasi yang berkaitan dengan kelautan, terutama isu kelautan yang bertujuan untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya kelautan, termasuk dalam penciptaan berbagai inisiatif ekonomi berbasis laut. Sebagai negara maritim, sayangnya konsep ini belum terlalu dikenal di Indonesia, tetapi penggunaannya semakin populer di tingkat global akhir-akhir ini². Popularitas ini tidak terlepas dari

² Diplomasi biru merupakan hasil dari serangkaian negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi bilateral dan multilateral baru yang melibatkan negara-negara dari lima benua. Perjanjian internasional ini menghubungkan kembali negara-negara ekonomi kuat di dunia, baik yang tradisional maupun yang baru berkembang sehingga memberikan nilai tambah pada aspek diplomasi dengan memperluas skalanya hingga pada tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya (Gutu, 2016; Yadav, 2023). Bentuk diplomasi ini bertujuan untuk mengatasi tantangan seperti polusi, penangkapan ikan berlebihan, dan keamanan maritim untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan. Pentingnya diplomasi biru juga ditandai dengan berkumpulnya para pemimpin dunia di pertemuan tingkat tinggi *One Ocean* di Prancis, yang mereka telah berkomitmen mewujudkan kesehatan dan tata kelola kelautan. Pertemuan itu juga dihadiri oleh ilmuwan terkemuka, organisasi non-pemerintah (LSM),

semakin tingginya kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut dari kerusakan. Bersama dengan ekonomi biru, diplomasi biru adalah sarana untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (*Sustainable Development Goals*, SDGs), khususnya Tujuan 14. Dengan demikian, ekonomi biru dan diplomasi biru menggunakan pendekatan holistik yang berorientasi menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kesehatan ekosistem laut dalam jangka panjang (Haque, 2021; Harrath, 2019; Islam, 2022).

Untuk menunjukkan perhatiannya yang meningkat di Pasifik Selatan, Indonesia membentuk Forum Pasifik Selatan Indonesia (*Indonesia South Pacific Forum*, ISPF) pada tahun 2019. Dengan menekankan prinsip manfaat dan saling menghormati, peran regional Indonesia dalam ISPF mencerminkan sikap Indonesia sebagai aktor regional penting dalam diplomasi di Pasifik Selatan. Diplomasi biru Indonesia di Pasifik Selatan merupakan strategi yang memiliki berbagai dimensi, termasuk dimensi politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia melihat kawasan ini semakin penting karena semakin kompleksnya kepentingan kekuatan global yang dapat memengaruhi kepentingan Indonesia. Dengan menyadari kedekatan geografis dan budaya dengan Pasifik, Indonesia berupaya memperkuat hubungan melalui *Pacific Elevation* (Darmawan, 2022), visi yang diperkenalkan oleh Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, pariwisata, dan pertukaran budaya. Pendekatan diplomasi biru akan mampu mengafirmasi strategi *Pacific Elevation*. Baik ISPF maupun *Pacific Elevation* bertujuan untuk menciptakan momentum dan meningkatkan keterlibatan Indonesia dengan negara-negara Pasifik guna mengatasi tantangan bersama³.

pembuat kebijakan, dan badan internasional, serta korporasi yang bergerak di bidang kelautan, seperti Maersk, CMA CGM, dan Hapag-Lloyd, yang kegiatan mereka mencakup hampir 55% angkutan laut dunia (TG, 2022).

³ Konsep *Pacific Elevation* merupakan konsep yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia di tahun 2019 yang menekankan pada upaya Indonesia untuk semakin meningkatkan posisinya dalam kemitraan dengan negara-negara pasifik (Pugu, 2024; Wati, Apresian, & Dewi, 2021). Terdapat dua isu utama dalam *Pacific Elevation* ini yaitu isu kemerdekaan Papua Barat dan isu perdagangan. In-

Sementara itu, negara-negara kepulauan Pasifik, yang secara global dikenal dengan sebutan “*small island developing states*” (SIDS)⁴ telah mengubah penyebutan mereka menjadi “*large ocean island states*” (LOIS). Sebutan baru ini perlu untuk mengubah persepsi internasional dengan menegaskan identitas mereka sebagai negara yang memiliki zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang luasnya melebihi jumlah daratan. Pengubahan ini merupakan bagian dari strategi diplomatik untuk menegaskan kepentingan mereka dan memengaruhi kebijakan internasional, khususnya yang berkaitan dengan agenda terkait kelautan (Bernard et al., 2021; Chan, 2018; Wyeth, 2028). Sejak 2017, *Pacific Island Forum* (PIF) memperkenalkan konsep ‘Pasifik Biru’ (*Blue Pacific*) yang menjadi identitas kolektif mereka, yaitu memosisikan kembali mereka sebagai negara samudra luas. Konsep ini merupakan cara mereka menghadapi situasi yang ditandai oleh kerentanan bersama, terutama terkait perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. *Blue Pacific* didasarkan pada gagasan bahwa negara-negara di Samudra Pasifik bukan hanya sekumpulan negara individual, tetapi mereka membentuk satu kesatuan yang saling terhubung secara geografis, budaya, dan menghadapi tantangan yang sama. Dengan

donesia ingin meningkatkan kehadirannya dengan meningkatkan perdagangan di Kawasan pasifik untuk meredam isu Papua merdeka. *Pacific Elevation* juga dapat dipahami melalui posisi Indonesia yang ingin lebih strategis di regional Asia Tenggara sebagai ekonomi yang semakin kuat bertumbuh (Kabutaulaka, 2020) sehingga penerapan *Pacific Elevation* ini, meliputi hampir semua bidang terutama pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi (Nugrahantya, 2021).

⁴ *Small Island Developing States* (SIDS) di Pasifik terdiri dari dua belas negara bagian independen yang terletak di Pasifik barat dan tengah Lautan: Negara Federasi Mikronesia (FSM), Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, Papua Nugini (PNG), Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. Selain itu, Kepulauan Cook dan Niue, berasosiasi bebas (*free association*) dengan Selandia Baru. Wilayah lainnya, Tokelau, bergantung pada Selandia Baru. Selanjutnya, ada sejumlah wilayah yang bergantung pada atau dalam asosiasi bebas dengan negara metropolitan di luar regional Pasifik, yaitu Perancis (Polinesia Perancis, Kaledonia Baru, Wallis, dan Futuna), Inggris (Kepulauan Pitcairn), dan Amerika Serikat (Samoa Amerika, Guam, dan Utara, dan Kepulauan Mariana) (Bernard et al., 2021).

dasar persamaan ini, *Blue Pacific* didirikan untuk memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi antara negara-negara kepulauan Pasifik yang menghadapi tantangan keamanan multidimensi, termasuk keamanan lingkungan dan strategis (Storey, 2024).

Melalui kolaborasi dalam *Blue Pacific*, mereka dapat mengatasi masalah mereka secara bersama-sama. Para pemimpin Pasifik menyadari pentingnya pendekatan terpadu dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan keamanan regional (Storey, 2024). Selain itu, identitas kolektif *Blue Pacific* juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan global dan memastikan suara mereka didengar oleh para pemimpin dunia⁵. Keterlibatan Indonesia dalam *Blue Pacific* menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap prioritas kawasan dan komitmen untuk menyelaraskan upaya diplomasi dengan kepentingan negara-negara Pasifik. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai negara Pasifik, Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan kepentingan nasional dengan aspirasi negara-negara Pasifik Selatan karena Jakarta menghadapi persoalan yang kompleks dengan negara-negara Pasifik Selatan. Kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan yang berat ini akan sangat penting dalam membentuk peranannya sebagai aktor regional dan memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Pasifik Selatan (Hutagalung, 2024).

Tulisan ini menjelaskan bagaimana diplomasi biru dapat memperkuat kehadiran Indonesia di Pasifik Selatan melalui KSST. Kami meyakini bahwa untuk memperkuat identitasnya di Pasifik, keterlibatan Indonesia dalam berbagai aspek di Pasifik Selatan sangatlah penting. Tanpa itu, identitas Pasifik Indonesia akan dianggap sebagai retorika politik belaka oleh negara-negara Pasifik. Diplomasi biru dapat menjadi titik awal utama untuk memperkuat

⁵ Dalam konteks yang lebih luas, meningkatnya kehadiran negara-negara besar dan tingginya tingkat kejahatan transnasional di wilayah ini menjadikan *Blue Pacific* juga memiliki dimensi strategis, yaitu menjaga keamanan dan stabilitas regional (UNDP, 2022).

keberadaan Indonesia di kawasan Pasifik. Diplomasi biru Indonesia terkait erat dengan *Look East Policy* yang memberikan prioritas pada hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan. Sebagai negara maritim, Pasifik Selatan menjadi subjek utama dalam isu-isu kelautan. Namun, Jakarta belum melihat hal ini sebagai kesempatan strategis untuk memperkuat posisinya di kawasan itu. Indonesia dapat menggunakan ISPF sebagai platform untuk kerja sama regional. Keberhasilan dalam memanfaatkan ISPF sebagai platform diplomasi biru akan memberikan dampak positif dalam memenuhi kebutuhan khusus negara-negara Pasifik Selatan serta meningkatkan kolaborasi dan kemitraan antara kedua belah pihak. Namun, tantangan yang dihadapi oleh diplomasi biru Indonesia tidaklah mudah. Selain menjadi kawasan yang menjadi titik api bagi kepentingan geopolitik aktor global dan regional, efektivitas diplomasi biru juga menghadapi tantangan yang berasal dari faktor internal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan mengenai kebijakan *Look East* melalui diplomasi biru dan juga dalam hubungannya dengan kerja sama Selatan-Selatan dengan level analisis negara. Pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan data sekunder berupa studi literatur dari berbagai sumber daring dan luring, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah populer, surat kabar, maupun sumber akademis lainnya. Sistematika tulisan ini meliputi pendahuluan lalu pembahasan mengenai diplomasi biru sebagai Instrumen Politik Luar Negeri *Look East*. Selanjutnya, dibahas mengenai keterlibatan Indonesia di Pasifik melalui Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular (KSST) lalu subbab yang menjelaskan mengenai bagaimana menyinergikan Kebijakan *Look East* melalui Diplomasi Biru dan KSST, dan diakhiri dengan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari bahan-bahan sekunder. Bahan-bahan ini didapat dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, *website* resmi pemerintah, dan organisasi internasional dengan tujuan untuk menemukan sumber yang paling relevan dan kredibel. Dengan bantuan internet, penulis berupaya menemukan materi tentang

Kebijakan *Look East* yang relevan dengan pendekatan diplomasi biru dalam skema KSST.

B. Diplomasi Biru sebagai Instrumen Politik Luar Negeri *Look East*

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas tentang Kebijakan Luar Negeri *Look East* Indonesia, diplomasi biru, dan Kerja Sama Selatan-Selatan, bagian ini menguraikan tiga konsep tersebut melalui telaah kepustakaan. Dinamika hubungan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik semakin berkembang dengan adanya politik luar negeri Indonesia yang berorientasi ke kawasan Pasifik, yang disebut Kebijakan *Look East*. Kebijakan ini dalam berbagai publikasi banyak dikaitkan dengan asal mula sejarah munculnya dan implementasinya di India yang dimaksudkan untuk menjalin hubungan dengan negara di Asia Tenggara (yang kemudian diperluas ke seluruh Asia Pasifik) serta membendung pengaruh berbagai negara besar seperti China (Fathullah, 2018; Sinaga et al., 2019). Namun, Prasetyo (2022) melihat bahwa Indonesia yang juga membuat kebijakan *Look East* merupakan bagian dari upayanya dalam menjaga hubungan dengan negara Pasifik Selatan dan dalam mempertahankan teritorinya, terutama terkait isu Papua. Kebijakan *Look East* ini dilakukan Indonesia melalui dua aspek, yaitu eksternal dengan menggunakan jalur diplomasi pertahanan, budaya, dan ekonomi termasuk pemberian bantuan luar negeri kepada negara-negara di Pasifik Selatan. Selain itu, kebijakan tersebut juga memprioritaskan kerja sama di level multilateral, trilateral, maupun bilateral dalam pembangunan di kawasan tersebut.

Terdapat empat pilar pembangunan kawasan Pasifik Selatan berdasarkan Kebijakan *Look East* Indonesia, yaitu keamanan, tata pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, dan pertumbuhan ekonomi. Empat hal tersebut berusaha dijaga oleh Indonesia karena sangat memengaruhi stabilitas politik ekonomi dan keamanan di Indonesia (Firmansyah, 2019). Kebijakan *Look East* merupakan bagian dari *repositioning* kebijakan luar negeri sekaligus

untuk memperbaiki dan meningkatkan citra Indonesia di negara di Kawasan Pasifik. Kebijakan tersebut difokuskan untuk membangun kerja sama pembangunan dengan negara-negara Pasifik Selatan, seperti Kiribati, Fiji, Tuvalu, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Isu Kemerdekaan Papua juga menjadi diskursus utama di antara negara-negara Pasifik Selatan utamanya terkait eksploitasi etnis ras Melanesia (Prasetyo & Zahidi, 2022). Melalui kebijakan luar negeri ini, Indonesia berusaha untuk melakukan penguatan hubungan dengan negara-negara di Pasifik Selatan.

Keterlibatan Indonesia di berbagai forum termasuk *Indonesia South Pacific Forum* (ISPF) sangat penting dalam mempertahankan stabilitas kawasan dan pengaruh di kawasan (Buiney & Wambrauw, 2024). ISPF merupakan wadah bagi negara Pasifik Selatan dengan Indonesia yang juga bergabung di dalamnya untuk melakukan dialog dalam mendiskusikan masalah yang terjadi dan pemetaan solusi dan potensi kerja sama di masa depan (Marsudi, 2019). ISPF diluncurkan di tahun 2019 dengan tema *Our Future, Shared Ocean, Shared Prosperity* yang diikuti oleh 15 negara, yaitu Tuvalu, Tonga, Selandia Baru, Marshall Island, Nauru, Kiribati, Solomon Islands, Palau, New Caledonia, Fiji, Australia, Federated States of Micronesia, Cook Islands, dan Papua Nugini. Ruang lingkup pembahasan ISPF meliputi peningkatan peran dan kehadiran Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan, pembahasan isu perubahan iklim, kelautan, dan pembangunan area pesisir termasuk penguatan perdagangan (Wardhani, 2023). Dalam kesempatan tersebut, Indonesia membuka kerja sama bilateral yang cukup intensif dengan negara-negara Asia Pasifik yang ikut serta (Buiney & Wambrauw, 2024).

Politik Luar Negeri *Look East* lahir di tengah pergolakan geostrategi di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini telah muncul sebagai titik fokus dinamika geopolitik global, dengan Samudra Hindia dan Pasifik berfungsi sebagai arena strategis bagi negara-negara besar untuk menegaskan pengaruh dan mengamankan kepentingan nasional mereka. Kawasan Indo-Pasifik telah mengalami pergeseran dinamika geopolitik, di mana pertimbangan maritim memainkan

peran penting dalam membentuk kepentingan strategis suatu negara (Yadav, 2023). Diplomasi Biru mengacu pada penggunaan strategis kemampuan maritim, kebijakan, dan inisiatif ekonomi untuk mencapai tujuan nasional dan mempertahankan pengaruh dalam domain maritim. Konsep tersebut juga dapat dilihat sebagai kerangka untuk memahami dan menafsirkan kebijakan maritim, kepentingan ekonomi, dan aspirasi geopolitik di Indo-Pasifik (Yadav, 2023). Lebih lanjut, Salman (2015) menjelaskan bahwa diplomasi biru pada dasarnya menghormati prinsip-prinsip ekonomi biru dengan mengembangkan ekonomi dan perdagangan dalam mengeksplorasi sumber daya air alami mereka dan mengambil risiko konflik di laut dan samudra lintas batas. Diplomasi ini melibatkan negara-negara tetangga dalam menemukan dan mengeksplorasi secara adil modalitas kelautan dengan menekankan pada upaya perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan nasionalnya (Salman, 2015).

Diplomasi Biru⁶ bisa dilihat sebagai konsep baru dalam mempromosikan keberlanjutan perairan di seluruh dunia dengan menerapkan berbagai alat kerja sama diplomasi ekonomi, keterampilan negosiasi multilateral, perdagangan internasional atas lautan, budi daya perikanan, pariwisata dan *branding* negara, serta peluang energi lepas Pantai. Sekali pun secara konseptual menjanjikan, diplomasi biru belum memiliki instrumen dukungan implementasi politik dan ekonomi yang seragam. Namun seiring dengan ekonomi hijau, praktik diplomasi biru mewakili masa depan hubungan perdagangan lintas samudra (Gutu, 2016).

Dalam penerapannya, diplomasi biru mencakup beberapa tujuan, seperti; dukungan dan penerapan hukum air internasional,

⁶ Dalam implementasinya, Pohl (2014) mengungkapkan ada beberapa kerangka kerja sama global dalam diplomasi biru dengan beberapa wadah untuk kerja sama biru, seperti *United Nations Environment Program* (UNEP), *United Nations Development Program* (UNDP), *United Nations (UN)-Water*, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations* (UNESCO), *United Nations Economic Commission for Europe* (UNECE) *Water Convention*, *Water Cooperation Facility* dan *World Water Council*. Adapun bidang yang menjadi fokus, meliputi legal institusi, penguatan kapasitas, finansial, dan koordinasi politik.

penggalangan dana dalam isu terkait sektor kelautan dan perairan, hingga penguatan *platform* institusional untuk kerja sama yang lebih koheren. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa diplomasi biru adalah versi baru dari diplomasi hijau, yang dikembangkan di perairan; atau diplomasi laut yang mengacu pada tindakan perdagangan terkait aktivitas kelautan di seluruh dunia, dan berfokus pada tindakan diplomasi di balik lingkungan ekonomi yang diciptakan, dengan memperkuat peran para aktor terkait dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Ide umumnya serupa dengan apa yang diusung oleh konsep ekonomi hijau, yaitu pengurangan risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi, hanya saja wilayah geografis yang dimaksud tidak permukaan tanah, melainkan permukaan air (Gutu, 2016).

Dalam terminologi yang berbeda, Prasetya dan Estriani (2018) memakai terminologi diplomasi maritim yang diinterpretasikan sebagai salah satu bentuk praktik politik luar negeri dengan tujuan memaksimalkan potensi kemaritiman suatu negara, untuk memengaruhi hubungan dengan negara lain dalam satu kawasan dalam memenuhi kepentingan nasional suatu negara berdasar hukum nasional mereka. Hal seperti ini telah diinisiasi oleh salah satu negara berpengaruh seperti Tiongkok. Melalui *Pingtan Declaration* misalnya, Tiongkok telah melibatkan SIDS dalam forum institusional yang membahas tentang *Blue Economy and Ecological Islands* pada tahun 2017 lalu (MFAPRC, 2022). Selain itu, sejak 2019 Tiongkok juga terlibat dalam KSS dengan menyelenggarakan pelatihan yang berkenaan dengan mitigasi perubahan iklim dan pembangunan rendah-karbon, serta membangun beragam infrastruktur pembangkit listrik bertenaga air di wilayah Pasifik Selatan (MFAPRC, 2022).

Potensi kelautan yang dimiliki Indonesia termasuk posisi geostrategis dan posisi geopolitiknya merupakan peluang besar dalam pengembangan ekonomi dan keamanan laut dengan diplomasi biru sebagai salah satu pilar penting dalam kebijakan kelautan di Indonesia (Yudilla & Amri, 2020). Indonesia melaksanakan setidaknya tiga bentuk diplomasi maritim, yaitu diplomasi maritim persuasif,

diplomasi maritim kooperatif, dan diplomasi maritim koersif (Rijal, 2019). Indonesia lebih menerapkan diplomasi maritim kooperatif dan persuasif dalam melaksanakan diplomasi maritimnya dengan memfokuskan pada aspek persuasi, kerja sama, dan negosiasi. Dengan demikian maka diplomasi biru adalah diplomasi spesifik terkait kelautan dan dimensi diplomasi yang menjelaskan alat, teknik, dan strategi penguatan diplomasi ekonomi terkait ekonomi biru antarsesama negara pesisir. Namun, diplomasi biru bukanlah diplomasi ekonomi, budaya, atau geopolitik tradisional. Sebaliknya, diplomasi ini bersifat kontemplatif dengan melibatkan perairan, ekonomi, politik, pemahaman, dan perjanjian internasional, serta mengutamakan kepentingan bersama dalam hubungan multilateral dan hidup berdampingan dalam satu wilayah (Haque, 2021).

Konektivitas diplomasi biru merupakan agenda utama dan sangat diperlukan dalam upaya menumbuhkan aspek pertumbuhan ekonomi biru. Diplomasi biru tidak seperti diplomasi yang orientasinya konvensional maka diplomasi biru memerlukan perhatian dan keseriusan khusus. Agar diplomasi biru memiliki fungsi ekonomi yang maksimal, diperlukan pengembangan ekonomi biru yang sukses dan berkelanjutan secara riil. Oleh karenanya, setiap negara pesisir harus memperluas cakrawala konektivitas diplomasi biru sebagai instrumen yang sangat diperlukan secara internasional untuk pengembangan warna biru ekonomi untuk negara pantai atau pesisir mana pun. Negara-negara yang berstatus negara SIDS dan negara-negara berkembang pesisir harus memperkuat cakrawala diplomasi biru dan konektivitas mereka dengan memanfaatkan dan meningkatkan ekonomi biru yang mereka inginkan sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari laut dan samudra mereka. Diplomasi biru merujuk pada banyak isu secara keseluruhan (Haque, 2021).

Sebagai sebuah platform baru, terdapat beberapa tantangan dalam melaksanakan diplomasi biru, seperti yang dikemukakan oleh Pohl et al. (2014), yaitu kurangnya *setting* institusional yang menghubungkan aktor penting dalam membuat suatu kerangka kerja sama di kawasan. Selain itu, juga tidak adanya peringatan dini

yang sistemik dan terkoordinasi dalam mencegah konflik perairan. Masalah kapasitas terkait sumber daya manusia dan keuangan juga menjadi tantangan besar dalam kerja sama lintas batas perairan. Lebih lanjut, Pohl (2014) menyatakan, dalam diplomasi biru terkadang para pembuat kebijakan, meskipun mereka memiliki tujuan ekonomi dan keberlanjutan yang serupa, namun secara internasional sering kali mereka terfragmentasi dan tidak mempunyai kekuatan politik. Dalam skala global, diplomasi biru tidak memiliki dampak yang sama terhadap negara-negara bahkan di kawasan yang sama dalam kerangka kerja sama regional. Hal ini dikarenakan masalahnya jauh lebih kompleks dengan melibatkan kemitraan dan perjanjian internasional bilateral atau multilateral antarnegara (Gutu, 2016).

Dalam implementasi diplomasi biru, negara-negara dapat bekerja sama melalui skema KSST. Konferensi Bandung pada tahun 1955 menandai kerja sama antara negara-negara di selatan, yang merupakan langkah penting bagi negara-negara berkembang untuk bekerja sama dalam mencapai kemandirian kolektif. Kerja sama ini secara konkret ditujukan untuk berbagi pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya guna mengatasi tantangan pembangunan dan mendorong pertumbuhan bersama. Kerja sama ini telah berkembang dengan pesat sehingga menghasilkan berbagai bidang fokus yang disesuaikan untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Bidang-bidang ini meliputi pembangunan pertanian, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, hak asasi manusia, urbanisasi, kesehatan, dan peningkatan kapasitas dengan penekanan pada saling menguntungkan dan semangat solidaritas (UNDP, 2022). Sifat kooperatif dari kerja sama Selatan-Selatan sangat penting dalam memajukan Agenda SDGs 2030 dan mengatasi tantangan sosial-ekonomi yang kompleks yang melampaui batas negara (BPPK, 2016; Rinaldi, 2023). Kebutuhan untuk saling mendukung dalam berbagai sektor menyebabkan Kerja Sama Selatan-Selatan mengalami pergeseran paradigma dari yang awalnya berfokus pada kerja sama di level teknis, seperti pertukaran tenaga ahli, transfer teknologi, hingga pembangunan kapasitas menjadi kemitraan yang sifatnya mencakup sektor strategis dan komprehensif.

Kawasan Indo Pasifik merupakan salah satu kawasan penting percaturan global. Keterlibatan Indonesia secara konstruktif dan memberi solusi diplomatik atas berbagai masalah yang dihadapi terutama di Pasifik Selatan sangat penting untuk menjamin stabilitas dan kemakmuran di kawasan. Situasi geopolitik bersifat dinamis, dan pilihan yang diambil oleh berbagai negara yang terlibat akan membentuk lanskap Indo-Pasifik di masa depan. Skenario strategis yang berkembang di Indo-Pasifik tampaknya rumit dan berlapis-lapis. Kerangka normatif yang muncul dari inisiatif strategis dan ekonomi negara-negara besar dan organisasi regional secara idealis didorong oleh keinginan akan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, berbasis aturan, inklusif, dan bebas dari segala cara koersif (Yadav, 2023). Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan kerangka diplomasi maritim kooperatif dalam berbagai forum. Indonesia melakukan berbagai diskusi dan negosiasi dengan negara-negara terutama di lingkup ASEAN untuk mengarah pada *outlook* kerja sama maritim di kawasan Indo-Pasifik (Khoirunissa & Aryani, 2021).

Kerangka kerja sama Selatan-Selatan memberi peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi dan meningkatkan perhatiannya ke Pasifik Selatan. Perhatian yang lebih besar ke wilayah ini menandai pergeseran dalam politik luar negeri Indonesia, menjadikan Pasifik Selatan sebagai salah satu prioritas setelah selama lebih dari tiga dekade sebagai kawasan marginalnya. Bagi Indonesia, kerja sama Selatan-Selatan dan diplomasi biru merupakan bagian integral dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dua inisiatif ini mendorong kolaborasi internasional untuk mengatasi permasalahan global berdasarkan pemahaman dan kepentingan bersama. Menggabungkan kerja sama Selatan-Selatan untuk mewujudkan dan memfasilitasi diplomasi biru dapat menghasilkan respons yang lebih terkoordinasi dan efektif terhadap tantangan-tantangan pembangunan dan pengelolaan lingkungan yang saling terkait.

Di lingkup Indo-Pasifik, Indonesia melakukan berbagai kemitraan yang sifatnya tidak hanya bilateral tetapi juga multilateral, seperti

Indonesia *Maritime Partnership Initiative* bersama Singapura, China, Korea Selatan, Jepang, dan India, serta *Heads of Asian Coast Guard Agency Meeting* (HACGAM) (Indrawati & Nugroho, 2019). Pada bulan Mei 2018, Indonesia menyampaikan konsep mengenai Pasifik Selatan dengan tiga elemen kuncinya, yaitu membangun lingkungan yang mendukung hukum internasional dan penyelesaian sengketa secara damai, mengatasi tantangan transnasional seperti terorisme dan pembajakan, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Samudra Hindia dan Pasifik Selatan dalam upaya penciptaan sistem perekonomian yang terbuka dan adil (Choong, 2019). Pada tahun 2022, dilaksanakan *Indonesia-Pacific Forum for Development* (IPFD) yang pertama bertempat di Bali. IPFD ini bisa saja diindikasikan bahwa Indonesia mempunyai komitmen dalam semakin meningkatkan kerja sama di kawasan Pasifik. Indonesia semakin meningkatkan kerja sama dengan Pasifik dengan visi *Pacific Elevation*. Sebelumnya, di tahun 2019, Indonesia menyelenggarakan *Indonesia South Pacific Forum* dan *Pacific Exposition* pada 2021. Dalam hal kerja sama ekonomi kelautan berkelanjutan, dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti hubungan antarmasyarakat, membuat platform pembangunan yang komprehensif dan inklusif, serta membuka peluang kerja sama pembangunan tanpa terkecuali. Indonesia juga berkeinginan untuk melakukan peninjauan terhadap berbagai modalitas kerja sama termasuk kerja sama triangular (KLNRI, 2022).

Pasifik Selatan merupakan salah satu fokus Indonesia dalam menjalin hubungan kerja sama Selatan-Selatan. Walaupun banyak dinamika yang terjadi, Indonesia tetap mempertahankan hubungan yang strategis melalui kerja sama di berbagai bidang termasuk kelautan. Forum Indonesia Pasifik Selatan selain membahas kerja sama untuk mewujudkan kawasan yang sejahtera dan damai, juga menyelenggarakan *Pacific Exposition* (PE) kedua. Pameran PE kedua dilaksanakan secara virtual pada 27 hingga 30 Oktober 2021 dengan nilai transaksi yang meningkat 30% dibandingkan PE pertama, yakni 1,48 triliun dolar atau 104,1 juta dolar AS. PE ini mencakup pameran pariwisata, perdagangan, dan investasi (Buiney &

Wambrauw, 2024). Pasifik Selatan sekarang menjadi arena persaingan strategis. Banyak hal telah berubah dalam beberapa dekade sejak Perang Dunia Kedua. Saat ini, Samudra Pasifik adalah rumah bagi empat belas negara berdaulat kebijakan luar negeri yang independen dan memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing (Morgan, 2020). Negara-negara Pasifik Selatan menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya alamnya, menangani kejahatan transnasional, melindungi kedaulatannya, dan mengelola ancaman lingkungan laut, serta bahaya alam (Bergin et al., 2019).

Indonesia, sebagai salah satu aktor regional di Indo-Pasifik, berdasarkan jumlah penduduknya dan faktor geopolitik, mempunyai kebutuhan akan penegakan hukum internasional, penyelesaian sengketa secara damai, serta perlunya konektivitas dan keamanan maritim di wilayah Indo Pasifik terutama Pasifik Selatan. Dari berbagai literatur, diskursus mengenai konsep diplomasi biru, utamanya dalam kerja sama Selatan-Selatan masih kurang mempunyai ruang diskusi sehingga tulisan ini, bisa menjadi salah satu alternatif dalam memandang kebijakan *Look East* Indonesia di wilayah Pasifik Selatan melalui kerja sama Selatan-Selatan utamanya dalam aspek diplomasi biru.

C. Keterlibatan Indonesia di Pasifik melalui Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular (KSST)

Indonesia dan posisinya sebagai salah satu negara '*global south*' telah berkontribusi dalam beragam kerangka kerja sama utamanya kerja sama Selatan-Selatan. Bertitik tolak semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung 69 tahun yang lampau, Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan profilnya dalam beragam isu global. Sebagai bagian dari kerangka kerja sama Selatan-Selatan, Indonesia juga aktif menjalin kerja sama dalam Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular (KSST). KSST sendiri telah menjadi prioritas utama dari kebijakan luar negeri Indonesia sebagaimana teragendakan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) (BAPPENAS, 2024). Dalam kerangka ini, Indonesia juga telah menunjukkan upaya untuk meningkatkan

profilnya sebagai '*the rising middle power*'. Dengan profil tersebut, Indonesia berupaya untuk menguatkan identitasnya dalam diplomasi global, khususnya pada negara-negara 'selatan'.

Meski awalnya posisi Indonesia dalam KSST ini adalah resipien/penerima bantuan, tetapi sejak 2003 Indonesia telah meningkatkan statusnya sebagai negara berpendapatan menengah (Trinidad, 2014). Peningkatan status ini menjadi aspirasi bagi Indonesia untuk mengakselerasi profil internasionalnya dalam beragam agenda pembangunan global. Kusumaningprang (2017) berpendapat bahwa meski Indonesia memiliki kapabilitas material yang cenderung terbatas, tetapi dalam beberapa hal Indonesia juga menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan ide dan mengupayakan aktivisme diplomatik yang mumpuni. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kepercayaan dan partisipasi Indonesia sebagai *co-host* dalam Konferensi Pemimpin Pembangunan (*Development Leaders Conference*, DLC) VI di Oslo pada Oktober 2023 lalu (KSPRI, 2023). Sejalan dengan peran terkininya dalam DLC tersebut, Indonesia tengah menunjukkan eksistensinya dalam beragam kerja sama pembangunan internasional sebagai '*new emerging donor*' dan '*southern provider*'. Dalam posisinya sebagai '*new emerging donor*' inilah, Indonesia perlu untuk menginisiasi kerja samanya dengan target untuk membangun citra yang lebih positif secara bertahap dan berkelanjutan (BAPPENAS, 2011).

Kerangka KSST dianggap amat menguntungkan bagi Indonesia yang termasuk dalam jajaran negara donor non-tradisional. Negara donor non-tradisional ini terdiri atas negara-negara dengan pendapatan menengah (*Middle Income Countries*, MICs) yang masuk dalam daftar penerima bantuan pembangunan asing (*Overseas Development Assistance*, ODA). Robledo (2015) menyatakan bahwa negara-negara MICs tersebut juga sekaligus sedang menapakkan perannya sebagai negara donor. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian KSST menjadi salah satu format kerja sama andalan bagi Indonesia dengan negara-negara selatan, utamanya dalam bidang politik, ekonomi, sosiokultural, dan teknikal.

Sumber daya KSST umumnya berasal dari partner triangular Indonesia, yang terdiri dari negara-negara maju dan organisasi internasional⁷ (BAPPENAS, 2011). Adapun pengelolaan dan koordinasi KSST Indonesia dimotori oleh Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional (KSPI) pada Kementerian Luar Negeri yang berperan sebagai Tim koordinasi Nasional KSS (Tim Kornas KSS) sejak tahun 2017 (KSPRI, 2023)⁸. Sementara itu, Kementerian lainnya juga terlibat dalam Tim Kornas, antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, juga Kementerian Pelaksana Pembangunan Nasional/Bappenas (KSPRI, 2023).

Adapun prioritas relasi diplomatik yang ditekankan oleh Indonesia tentu bukan hanya pada wilayah regional Asia Tenggara. Sebagai salah satu negara kepulauan yang sebagian teritorialnya termasuk dalam wilayah Pasifik, Indonesia juga memprioritaskan lingkaran konsentriknya di kawasan ini (KLNRI, 2013). Dalam cetak biru, KSS juga termaktub bahwa komunitas regional dan sub-regional di kawasan Pasifik, seperti *South West Pacific Dialogue* (SwPD) dan *Pacific Islands Forum* (PIF) adalah prioritas bagi kerja samanya (BAPPENAS, 2011).

Wilayah ini menjadi semakin penting bagi Indonesia, sebab hubungan antara Indonesia dan negara-negara di kawasan ini tidak selalu dalam kondisi yang stabil. Salah satu isu yang sering kali mewarnai relasinya dengan negara Pasifik Selatan adalah mengenai isu Papua. Hingga, Indonesia merasa perlu untuk memelihara hubungannya dengan negara-negara tersebut. Santarita (2002) mencatat bahwa Indonesia perlu untuk memitigasi dan mengomunikasikan beragam

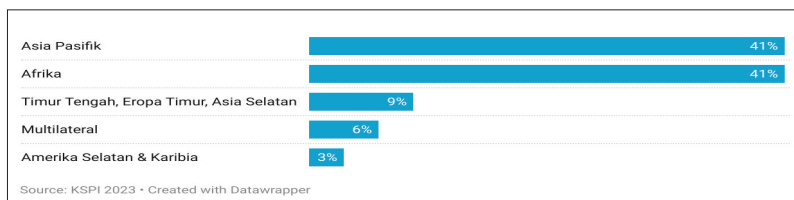
⁷ Beberapa partner kerja sama triangular tersebut antara lain; Jepang (*Japan International Cooperation Agency*, JICA), *Islamic Development Bank* (IDB), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jerman (*Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*, GIZ), *United States Agency for International Development* (USAID), *United Nations Development Program* (UNDP), Bank Dunia, dan lainnya (BAPPENAS, 2011).

⁸ Kementrian lainnya juga terlibat dalam Tim Kornas antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementrian Keuangan, juga Kementerian Pelaksana Pembangunan Nasional/Bappenas (KSPRI, 2023).

hal, khususnya setelah Timor Leste memisahkan diri pada tahun 1999. Selain itu, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk menjembatani kawasan Pasifik dengan rekan-rekannya di ASEAN. Hal ini serupa dengan apa yang dikemukakan oleh (Webb-Gannon & Elmslie, 2014) bahwa untuk meyakinkan negara-negara Pasifik agar bekerja sama lebih erat dengan Jakarta adalah dengan memberikan janji untuk membuka pintu gerbang kemakmuran ekonomi Asia melalui Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Pamasiwi dan Arsyani (2019) mengemukakan bahwa memberikan prioritas kepada negara-negara di Pasifik memiliki kepentingan strategis untuk menciptakan citra positif di antara mereka. Mengingat letak geografis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, tindakan geostrategis Jakarta sangat bergantung pada dinamika regional. Hal ini sejalan dengan pendekatan '*dynamic equilibrium*' yang pernah diungkapkan oleh Menteri Natalegawa. Melalui rencana geostrategis ini Indonesia berkontribusi pada pembentukan tatanan regional di tengah meningkatnya persaingan antara AS dan China di Indo-Pasifik (Mubah, 2019).

Kerja sama dengan negara Pasifik tercatat semakin intensif sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melalui terbentuknya Forum Dialog Pasifik Barat Daya (*Southwest Pacific Dialogue*, SwPD). Dalam forum ini, Indonesia memulai intensifikasi diplomasinya dengan 5 negara Pasifik lainnya, yakni Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, juga Timor Leste (BPPK, 2016)⁹. Kajian yang sama juga mencatat bahwa program kerja sama Indonesia pada wilayah tersebut berfokus pada bantuan teknik yang berupa program peningkatan kapabilitas, seperti program magang dan pelatihan, serta bantuan tenaga ahli. Di samping itu terdapat pula bantuan beasiswa dan hibah peralatan pendidikan.

⁹ Menyusul kemudian beragam kegiatan lain dalam kerangka KSST yang melibatkan lebih banyak negara-negara Pasifik seperti Fiji, Vanuatu, serta Solomon Islands.



Sumber: KSPRI (2023)

Gambar 7.1 Porsi Hibah RI pada Pemerintah/Lembaga Asing

Sebagai bagian dari perwujudan upaya penguatan citranya sebagai ‘*new emerging donor*’, Indonesia mengimplementasikan berbagai kerja sama hibah dalam kerangka KSST. Dalam laporan capaian KSST 2023 mencatat bahwa selain Afrika, negara-negara di kawasan Asia-Pasifik menjadi rekan terbesar dalam perjanjian hibah KSST Indonesia (Gambar 7.1). Dari 13 total realisasi perjanjian hibah kawasan Asia-Pasifik, 11 di antaranya melibatkan negara-negara di kawasan Pasifik, dan organisasi multilateralnya, yakni *Melanesian Spearhead Group* (MSG) (Tabel 7.1). Jika dilihat dari data capaian kerja sama KSST Indonesia dengan mitra Pasifiknya, tampak bahwa mayoritas realisasi kerja samanya berupa program pelatihan teknik yang berfokus pada keterampilan administratif, kesehatan, dan pertanian (KSPRI, 2023). Hal ini memang sesuai dengan kesepakatan Agenda Pembangunan Doha (*Doha Development Agenda*, DDA) yang memfokuskan pada aspek jasa, pertanian, dan akses pasar non-agrikultur.

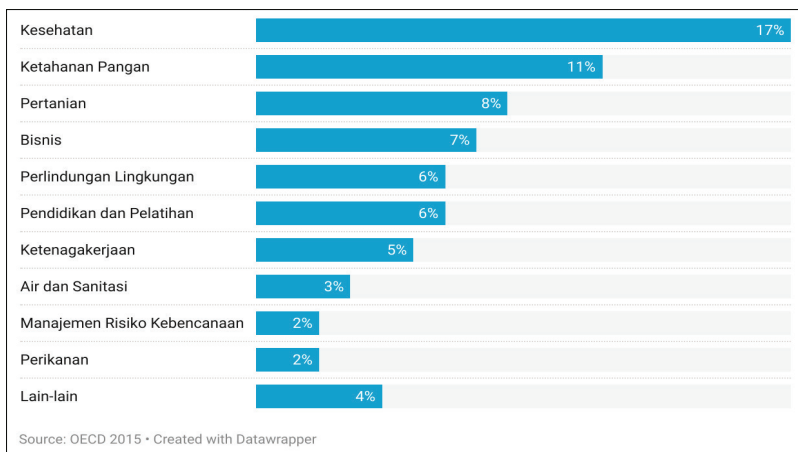
Tabel 7.1 Realisasi Program Kerja Sama Hibah KSST Indonesia di Pasifik Selatan Tahun 2023

No	Program	Nominal Hibah (dalam rupiah)	Mitra	Jumlah Kerja Sama
1	Program magang aparatur sipil lintas K/L	4.484.129.100	Timor Leste	5
2	Program magang aparatur sipil di Kemendag	1.230.672.300		
3	Pelatihan teknis klasifikasi barang, nilai pabean, dan <i>rules of origin</i> TLCA	1.632.089.400		
4	Pelatihan Eksekutif : <i>Customs Modernization</i> untuk pegawai TLCA	450.343.120		
5	Pelatihan standar akuntansi pemerintah dan swasta	2.079.880.616		
6	Program desain teknik Rumah Sakit Umum Port Moresby	5.759.135.114	Papua Nugini	2
7	Program pembangunan <i>Integrative West Sepik</i>	5.001.631.813		
8	Studi awal pembangunan Pusat Pelatihan pertanian regional raki-raki	4.333.721.535	Fiji	1
9	Program pelatihan budaya ayam broiler	4.516.760.600	Kepulauan Solomon	1
10	Hibah kendaraan operasional MSG	2.140.710.000	MSG	2
11	Pelatihan tahap lanjutan di bidang perikanan	1.568.611.946		
Total Kerja Sama Hibah		33.197.685.544		11

Sumber: IndonesianAid (2023); KSPRI (2023)

Seperti telah diketahui bahwa keterlibatan Indonesia dalam KSST menysar tujuan besar berupa kemandirian bersama bagi negara-negara mitra, utamanya negara-negara selatan. Meski sejak awal inisiasinya, KSST Indonesia ini telah menekankan prinsip *demand-driven* bagi negara mitra, akan tetapi dalam beberapa program bantuan ternyata masih nampak penekanannya pada bantuan-bantuan teknikal yang bersifat pengayaan kapasitas pertanian (Tabel 7.1). Padahal, jika merujuk pada cetak birunya, tahun 2024 ini Indonesia seharusnya perlu menysar beberapa target yang makin menunjukkan komprehensivitas dari KSST guna mewujudkan tujuan kemandirian bersama negara-negara selatan (BAPPENAS, 2011). Hal yang tentunya tidak lepas dari prioritas nilai KSST yang juga menekankan aspek kepemilikan (*ownership*) dari program (BAPPENAS, 2011). Hingga seharusnya kecenderungan untuk menambah keragaman jenis kerja sama KSST perlu dilakukan oleh Indonesia agar koheren dengan perkembangan isu-isu baru yang mengikuti dinamika global, seperti salah satunya isu perubahan iklim dan penyertanya.

Laporan survei dari OECD (2016) menemukan bahwa mayoritas kerja sama dan program KSST di negara-negara SIDS justru tidak terkait berkenaan dengan mitigasi atau adaptasi perubahan iklim. Alih-alih berkaitan langsung dengan kerentanan SIDS terhadap perubahan iklim, program KSST yang ditargetkan pada SIDS paling banyak terkait dengan pemerintahan dan sektor publik (29%). Disusul kemudian dengan program kesehatan (17%), ketahanan pangan (11%), pertanian (8%), dan bisnis (7%) (Gambar 7.2).



Sumber: OECD (2016)

Gambar 7.2 Bidang Kerja Sama KSST di SIDS

Jika ditilik secara makro, sebenarnya jumlah kerja sama dalam KSST dengan di kawasan Pasifik ini belum sedominan negara-negara di kawasan Karibia. Tercatat bahwa program KSST pada negara-negara kawasan Pasifik hanya terdiri atas 26% saja (OECD, 2016). Ini jauh dari jumlah program KSST di Karibia yang mencapai 66% (OECD, 2016). Guna menyikapi hal tersebut, sebenarnya Indonesia harus mulai memaksimalkan perannya sebagai negara kepulauan terbesar di Pasifik (KLNRI, 2021). Meski intensitas kerja sama dalam upaya diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik telah rutin dilakukan setidaknya dua tahun sekali melalui program *Pacific Exposition*, tetapi perlu juga mengiringinya dengan pendekatan lain. Hal ini amat perlu dilakukan sebagai bentuk keseriusan Indonesia untuk keluar dari anggapan bahwa segala macam program dan kerja sama yang ditawarkan Indonesia pada negara-negara Pasifik tidak lebih dari sekadar retorika belaka (Wangge, 2023).

Dalam artikel ini, penulis berargumen bahwa diperlukan pendekatan yang lebih menekankan perspektif maritim dalam berhubungan dengan negara-negara di Pasifik ini. Pendekatan

kemaritiman penting digunakan untuk memosisikan Indonesia sebagai mitra terdekat bagi negara-negara Pasifik yang hampir seluruhnya merupakan negara dengan mayoritas wilayah berupa perairan. Ini sekaligus dapat memperteguh komitmen KSST Indonesia pada negara-negara Pasifik yang menekankan nilai kepemilikan (*ownership*). Apalagi hasil survei OECD (2016) pada SIDS menyimpulkan bahwa salah satu hal yang memotivasi negara-negara tersebut untuk turut serta dalam KSST adalah kemiripan budaya dan keselarasan pandangan. Dalam hal ini, upaya penerapan diplomasi biru dalam program KSST di negara-negara Pasifik, seharusnya menjadi amat relevan bagi Indonesia yang juga merupakan negara dengan wilayah maritim yang luas.

Bercermin dari data KSST, Indonesia pada negara-negara Pasifik yang selama ini mayoritas masih berfokus pada program pelatihan aparatur sipil dan pertanian agraris (Gambar 7.2). Pada tahun 2023 misalnya, hanya terdapat 1 program yang berkaitan dengan perikanan yang menargetkan pada negara-negara anggota MSG, dengan total hibah sekitar 1,5 miliar rupiah (IndonesianAid, 2023). Jumlah ini jauh dari jumlah total realisasi hibah KSST Indonesia ke wilayah Pasifik yang mencapai 33,2 miliar rupiah (IndonesianAid, 2023). Dari data tersebut, terdapat kesan bahwa Indonesia belum terlalu menampakkan perspektifnya sebagai negara maritim. Padahal, sebagai bagian dari negara yang mengidentifikasi diri sebagai negara Pasifik, Indonesia memiliki isu dan tantangan yang serupa dengan negara-negara di Pasifik. Isu-isu sensitif yang terkait dengan dampak perubahan iklim, polusi air, manajemen kebencanaan, perikanan, dan manajemen infrastruktur pesisir, adalah beberapa permasalahan yang kerap kali menjadi tantangan bagi negara kepulauan. Inilah yang menjadikan beberapa kalangan masih beranggapan bahwa identitas Indonesia sebagai negara maritim masih sekadar terbatas pada retorika saja.

Dengan demikian, sudah saatnya Indonesia bergeser dari perspektif agraris menuju perspektif maritim melalui diplomasi biru. Hal ini sekaligus dapat menjadi langkah strategis Indonesia untuk menavigasi relasinya dengan negara-negara Pasifik di tengah rivalitas

Amerika Serikat dan China di kawasan ini. Sebagai negara *middle power* yang relatif memiliki keterbatasan dalam kapabilitas materi, pergeseran pendekatan ini adalah langkah efektif bagi Indonesia. Dengan menerapkan diplomasi biru dalam KSST, Indonesia tengah menunjukkan kapabilitasnya dalam aktivisme diplomatik dengan menjaring kekuatan-kekuatan kecil dan menengah lainnya di kawasan Pasifik melalui ide dan identitas kemaritimannya. Di samping itu, dengan menggunakan pendekatan maritim, program-program KSST Indonesia lebih berpotensi efektif bagi semua pihak—donor dan resipien. Dalam hal ini, setidaknya Indonesia dapat mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Australia melalui kebijakan *Pacific Engagement* yang di antaranya berfokus pada kerja sama kelautan yang berkelanjutan dan pendampingan sektor perikanan (DFAT, n.d.).

D. Mensinergikan Kebijakan *Look East* melalui Diplomasi Biru dan KSST

Salah satu tujuan awal KSST adalah “mengalahkan hegemoni negara maju” terhadap negara berkembang (Engel, 2019; Gray & Gills, 2016) sehingga menciptakan keseimbangan kekuatan yang lebih adil di tingkat internasional. Berdasarkan hal tersebut maka proyek-proyek dalam KSST yang diarahkan ke Pasifik Selatan mencakup berbagai inisiatif yang dirancang untuk memperkuat ketahanan dan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Diplomasi biru yang menjadi fokus perwujudan Kebijakan *Look East* menekankan pentingnya penguatan kerja sama di bidang kelautan mengingat tantangan yang ada, seperti perubahan iklim, bencana alam, dan keamanan sumber daya laut. Bagian ini mengupas tentang apakah pentingnya meletakkan diplomasi biru dengan menyinergikan KSST dalam Kebijakan *Look East*.

Pertama, KSST secara signifikan mendukung diplomasi biru Indonesia dengan membina kemitraan dan berbagi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya di antara negara-negara berkembang, khususnya di sektor maritim. Kolaborasi ini sejalan dengan RPJMN Indonesia 2020–2024, yang menekankan pentingnya Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dalam mencapai prioritas nasional dan tujuan

pembangunan berkelanjutan (BAPPENAS, 2020). Kolaborasi ini dapat terwujud karena membaiknya perekonomian Indonesia sehingga mendorong pemerintah untuk berperan aktif mempromosikan kerja sama horizontal di antara negara-negara berkembang sebagai penyedia donor dalam kelompok non-DAC (*Development Assistance Committee*). Sekalipun Indonesia masih menerima bantuan luar negeri, sejak kurang lebih dua dekade ini Indonesia bekerja sama dengan negara maju dan lembaga internasional untuk menyalurkan dana ke negara-negara Pasifik (Sari, 2022). Penyaluran dana ini merupakan bentuk partisipasi Indonesia pada kebutuhan pembangunan di Pasifik, sekaligus menjadi instrumen bagi membangun dan memperbaiki citra internasional Jakarta di wilayah itu. Seperti diketahui bahwa Kepulauan Pasifik adalah wilayah yang paling bergantung pada bantuan luar negeri, yang kondisi ini mendorong persaingan geopolitik untuk mendapatkan pengaruh di antara negara-negara donor sehingga memicu tingginya bantuan pembangunan¹⁰. Sekalipun dari segi kuantitas tidak sebanding dengan jumlah yang diberikan oleh donor utama, alokasi dana bantuan Indonesia ke luar negeri yang diarahkan kepada negara-negara Pasifik Selatan mencapai 26%, dan ini pun tidak berkaitan langsung dengan kerja sama kelautan. Dana tersebut disalurkan melalui *Indonesian Agency for International Development* (IndonesianAid) yang didirikan pada tahun 2019 (Wahyudi, 2021). Namun, patut menjadi perhatian bahwa sebagian besar aliran bantuan ditujukan ke Afrika.

Kedua, melalui KSST, Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan dapat bekerja sama dalam proyek-proyek mitigasi dan adaptasi

¹⁰ Peneliti Lowy Institute mencatat terdapat 14 negara penerima utama di kawasan Kepulauan Pasifik, yaitu Kepulauan Cook, Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia (Mikronesia), Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini (PNG), Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. Secara keseluruhan, wilayah ini menerima lebih dari \$40 miliar ODF antara tahun 2008 dan 2021. Australia merupakan pendonor utama, diikuti oleh Bank Pembangunan Asia, China, Selandia Baru, dan Jepang. Australia adalah donor terbesar di Pasifik, sekitar 40% dari total *Official Development Finance* (ODF) (Dayant et al. 2023).

perubahan iklim, yang merupakan bagian penting dari kerangka kerja UNFCCC. Sesuai dengan rencana strategis Indonesia dalam adaptasi dan mitigasi iklim (KLHKRI, 2018), KSST dipandang sebagai elemen kunci untuk rencana aksi iklim negara-negara Pasifik Selatan dan Indonesia yang dikenal sebagai *Nationally Determined Contributions (NDCs)* (UNCCS, n.d.). Dalam konteks Pasifik yang menghadapi ancaman tenggelamnya negara mereka, KSST menekankan pentingnya aksi kolektif dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait aksi iklim (SDG 13), kehidupan di bawah air (SDG 14), dan kehidupan di darat (SDG 15). Dalam kaitan ini, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) mengakui peran KSST dalam mempercepat aksi iklim.

Kebijakan *Look East* yang berfokus ke kawasan Pasifik Selatan, bersinggungan dengan permasalahan perubahan iklim dalam beberapa hal. Selain bertujuan untuk membina hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi, Kebijakan *Look East* juga mempunyai implikasi lingkungan. Sebagai penghasil emisi gas rumah kaca dan perubahan penggunaan lahan, Indonesia menyadari pentingnya mengatasi perubahan iklim untuk menjaga stabilitas dan pembangunan regional (WB, 2023). Selain itu, pendekatan Indonesia terhadap perubahan iklim, khususnya dalam transisi menuju perekonomian rendah karbon dan berketahanan iklim, sangat penting bagi negara-negara Pasifik Selatan, yang sebagian besar merupakan negara kepulauan kecil yang rentan terhadap dampak iklim¹¹.

Ketiga, diplomasi biru Indonesia dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan potensi kerja sama ekonomi yang terganggu karena perubahan iklim. Indonesia dan negara-negara

¹¹ Bagi negara-negara Pasifik Selatan, transisi Indonesia menuju perekonomian rendah karbon, sangat penting. Isu perubahan iklim mendominasi agenda KTT PIF ke 50 di Funafuti, Tuvalu, 13–16 Agustus 2019, yang dihadiri Indonesia sebagai mitra dialog PIF. Pada pertemuan itu, PIF mengesahkan *Kainaki II Declaration for Urgent Climate Change Action* dan sepakat untuk menyusun *2050 Strategy for the Blue Pacific Continent* (KLNRI, 2019). Agenda PIF ini selaras dengan Kebijakan *Look East* yang memberi bantuan kepada negara-negara Pasifik berperan penting dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pasifik Selatan memiliki kesamaan status sebagai negara kepulauan yang rentan perubahan iklim sehingga dapat berdampak pada sektor perekonomian. Berangkat dari persoalan ini, terdapat kaitan erat antara diplomasi biru dengan ekonomi biru karena keduanya menekankan pentingnya tata kelola laut yang berkelanjutan dan kerja sama ekonomi. Dengan berfokus pada ekonomi biru (yang mencakup industri berbasis kelautan, perikanan berkelanjutan, dan pariwisata maritim) (Faizasyah, 2019), Indonesia dapat menunjukkan komitmennya terhadap sektor kelautan yang menguntungkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini juga dapat menunjukkan keselarasan dengan narasi *Blue Pacific*, yang memprioritaskan isu-isu lingkungan dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan persaingan geopolitik (Goh, 2023). Ketidakberpihakan Indonesia dalam persaingan geopolitik di Indo-Pasifik dapat menjadi poin penting bagi negara-negara Pasifik Selatan untuk menaruh kepercayaan yang lebih tinggi pada Indonesia. Atas dasar ini maka diplomasi biru Indonesia berpotensi membangun kembali kepercayaan dan membangun hubungan yang lebih kuat dan tangguh dengan negara-negara tetangga di Pasifik Selatan. Inisiatif Indonesia dalam ISPF dan *Pacific Exposition* serta kontribusinya pada lembaga multilateral, seperti *Our Ocean*, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai bagian dari negara Pasifik yang asertif¹².

Keempat, sesuai dengan misi diplomasi biru, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan langsung dalam memastikan bahwa isu-isu seperti kenaikan permukaan air laut dan pengelolaan sumber daya laut ditangani dengan pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Pada bulan Oktober 2023, Indonesia menjadi tuan rumah KTT *Archipelagic and Island States* (AIS) Forum 2023 sehingga memungkinkan Indonesia untuk memimpin diskusi dan inisiatif regional yang dapat mendukung kebijakan luar negeri dan

¹² Pada konferensi *Our Ocean* pada tahun 2022, Indonesia memberi tiga komitmen pada konferensi tersebut, yakni membangun enam *Aquaculture Village*; Menetapkan dua juta hectares *Marine Protected Area* (MPA) baru; dan menyediakan dana sebesar US\$ 73,3 juta untuk kegiatan pengawasan kelautan dan perikanan dan menerapkan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat untuk memerangi penangkapan ikan yang merusak lingkungan (Rony, 2022).

keamanan maritimnya. KTT ini juga dihadiri sejumlah negara Pasifik Selatan serta perwakilan organisasi regional di kawasan itu, yaitu *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dan *Pacific Island Forum* (PIF) (KPEKRI, 2023). Pertemuan ini merupakan salah satu mekanisme yang menyinergikan kebijakan luar negeri *Look East* dengan *Blue Pacific*. Forum diplomasi multilateral ini menjadi ajang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan negara-negara Pasifik Selatan dengan cara mempertajam strategi dalam menghadapi isu-isu kelautan global, khususnya perubahan iklim, yang merupakan tantangan signifikan bagi negara-negara kepulauan. Pembahasan AIS Forum 2023 berfokus pada empat isu, yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah laut, dan tata kelola maritim yang baik (Pramudyani, 2023)¹³.

Untuk mendukung diplomasi biru dalam kerangka KSST, Indonesia telah mendedikasikan dana sejumlah JPY 20,7 miliar (sekitar US\$ 150 juta) untuk program-program konservasi laut dan ekonomi biru. Inisiatif ini dikenal dengan *Indonesian Sovereign Blue Bond* (Obligasi Biru Negara Indonesia) yang diluncurkan pada Mei 2023 (UNDP, 2023; UNSDG, 2023). Inisiatif ini secara langsung berkontribusi terhadap tujuan Forum AIS¹⁴. Fokus kegiatan ini adalah pada konservasi dan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir yang berkelanjutan sejalan dengan kebutuhan Pasifik Selatan, di mana

¹³ Salah satu kegiatan pendamping KTT AIS 2023 yang mendukung keberlangsungan diplomasi kelautan adalah diselenggarakannya “*AIS Startup Blue Business Summit*”. Pertemuan ini adalah platform bagi para *bluepreneur* untuk tumbuh dan terhubung dengan pemangku kepentingan terkait kelautan, inovator teknologi kelautan, dunia usaha, perwakilan bisnis, dan calon investor (KPEKRI, 2023).

¹⁴ Dampak obligasi ini tidak hanya memberikan manfaat langsung terhadap lingkungan, tetapi juga meningkatkan peluang ekonomi dan penghidupan berkelanjutan bagi ketahanan jangka panjang masyarakat Pasifik Selatan secara inklusif. Hasil penerbitan obligasi ini pembiayaannya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif berbasis kelautan, seperti perlindungan pesisir, pengelolaan perikanan dan budi daya perairan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati laut, dan rehabilitasi mangrove (UNDP, 2023).

laut merupakan sumber makanan, pendapatan, dan identitas budaya yang penting. Berdasarkan narasi ini dapat dilihat keterkaitan antara KTT AIS Forum 2023 dan Obligasi Biru Negara Indonesia dalam mendukung diplomasi biru dan Kebijakan *Look East*. Indonesia dapat menciptakan kemitraan strategis dan memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam isu-isu kelautan antarnegara kepulauan. Langkah ini tidak hanya membuat diplomasi biru tidak hanya memiliki fungsi lingkungan, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi, yaitu pengentasan kemiskinan.

Upaya menyinergikan politik luar negeri *Look East* melalui instrumen diplomasi biru dengan memanfaatkan skema KSST bukan tanpa tantangan. Indonesia telah mengambil banyak langkah penting untuk upaya tersebut tetapi belum maksimal karena Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Sementara faktor eksternal seperti kompleksitas geopolitik dan kepentingan ekonomi global yang dapat memengaruhi kebijakan dan prioritas nasional, merupakan hal yang sulit untuk dikontrol. Sementara itu, faktor internal menyangkut sumber daya dan kapasitas institusional yang terbatas dapat menghambat upaya diplomasi. Lebih jauh, perlu adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung inisiatif diplomasi biru.

E. Penutup

Keterlibatan Indonesia di Pasifik Selatan merupakan wujud peningkatan peran Indonesia di kancah internasional dan keinginannya untuk dipandang sebagai kekuatan regional yang asertif dan bertanggung jawab. Menavigasi politik luar negeri *Look East* dengan menggunakan instrumen diplomasi biru melalui kerangka KSST bertujuan memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan kepentingan kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan global, yang sejalan dengan tujuan SDGs. Indonesia telah melakukan upaya-upaya yang bertujuan mengimplementasikan apa yang menjadi target politik luar negerinya, yang hal ini mencerminkan pengakuan Indonesia atas sifat saling terkait

antara faktor iklim, kerja sama, stabilitas, dan pertumbuhan bersama. Sebagai negara maritim, Indonesia dapat memaksimalkan perannya dalam kerja sama biru dengan negara-negara Pasifik Selatan. Melalui inisiatif seperti KSST dan pembentukan *Indonesian Aid*, Indonesia memberikan hibah, bantuan teknis, dan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara Pasifik Selatan agar kawasan ini kondusif sebagai kawasan yang stabil dan bersahabat. Secara ekonomi, kawasan ini juga dapat dikondisikan sebagai investasi bagi stabilitas ekonomi masa depan dan pasar potensial. Keberhasilan memaksimalkan peran itu tergantung pada sejumlah faktor, yaitu internal dan eksternal.

Efektivitas dan penerimaan bantuan Indonesia berkaitan dengan dinamika regional di Pasifik Selatan. Beberapa negara Pasifik telah menyatakan keprihatinannya atas hambatan yang melekat pada bantuan tersebut. Keterlibatan Indonesia di Pasifik mendapat apresiasi sekaligus menuai kritik karena sifat bantuan yang mampu memengaruhi opini politik atas isu kemerdekaan Papua. Keberhasilan diplomasi ini bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menampilkan diri sebagai mitra yang memberi nilai tambah bagi komunitas Pasifik. Diplomasi Indonesia dituntut mampu menavigasi kompleksitas persoalan berbagai pandangan yang bertolak belakang ini. Selain itu, dalam implementasi diplomasi biru di Pasifik Selatan, Indonesia juga berhadapan dengan negara-negara berpengaruh lainnya di kawasan ini, yang semuanya memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang signifikan di Pasifik Selatan, seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan China.

Kerja sama Indonesia dengan Pasifik Selatan selama ini lebih banyak dilakukan di sektor non-kelautan yang tidak secara langsung mendukung keberhasilan diplomasi biru, yang hal ini dapat menjadi evaluasi bagi para pengambil keputusan. Orientasi *land-based*, bukan *ocean-based*, masih mendominasi bantuan Indonesia ke Pasifik Selatan. Hal ini mencerminkan kurangnya perhatian Indonesia kepada persoalan kelautan sehingga dukungan terhadap upaya total dan kesinambungan diplomasi biru perlu ditinjau lebih serius. Bantuan yang diberikan kepada Pasifik sama besarnya dengan bantuan kepada

negara-negara Afrika. Tanpa mengurangi arti penting Afrika, tidak nampak bahwa bantuan ke Pasifik berorientasi kelautan.

Di bawah skema KSST yang melibatkan FAO, bantuan Indonesia ke Pasifik Selatan masih berfokus pada bantuan pertanian mengingat tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Pasifik adalah ketahanan pangan. Basis sumber alamnya yang terbatas, terutama negara-negara kepulauan kecil menyebabkan keamanan pangan yang rendah. Sebagian negara kepulauan memperoleh sumber makanan dari impor berupa makanan kaleng dari negara terdekat, seperti Australia dan Selandia Baru. Konsumsi makanan kaleng ini menyebabkan persoalan kesehatan yang pelik, seperti obesitas, gangguan jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Oleh karena itu, bantuan pertanian masih menjadi prioritas Indonesia pada saat ini. Bantuan pertanian dapat menjadi langkah awal dari bantuan yang dapat memperkuat komitmen pada pengembangan ekonomi biru. Fakta ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan Indonesia ke negara-negara Pasifik lebih didasarkan pada kepentingan untuk mewujudkan agenda nasional Indonesia, yaitu menarik simpati negara-negara Pasifik untuk mendukung integritas teritorial dan memperbaiki citra global Indonesia (*donor-driven*). Agar tidak terjebak pada retorika politik tersebut, bantuan luar negeri harus didasarkan pada pemberdayaan, kepemilikan, dan keterlibatan aktor lokal.

Luasnya perairan Indonesia menjadi signifikan bagi kuatnya peran yang dijalankan. Untuk mengafirmasi posisinya sebagai negara kelautan, Indonesia dapat menyinergikan Kebijakan *Look East* dengan Pasifik Selatan melalui Diplomasi Biru dengan memanfaatkan skema Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular. Beberapa inisiatif yang dapat dilakukan Indonesia, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Mengembangkan kerja sama triangular sebagai mitra yang saat ini sedang gencar mempromosikan ekonomi biru dan diplomasi biru, seperti India yang telah menunjukkan pergeseran dari *Look East Policy* menjadi *Act East Policy*.
- 2) Memanfaatkan identitasnya sebagai bagian dari Pasifik, Indonesia dapat menjalin kerja sama kelautan melalui pendekatan sosial

budaya sambil memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara Pasifik Selatan, misalnya dalam bentuk kemitraan dalam bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada para pemuda Pasifik tentang kemaritiman.

- 3) Sebagai negara yang berpengaruh dalam multilateralisme di tingkat regional, Indonesia dapat menginisiasi pertemuan regional dan multilateral, seperti ASEAN dan G20, untuk memfasilitasi dialog dan kerja sama yang lebih luas dengan negara-negara Pasifik Selatan.

Lebih jauh, Indonesia dapat memanfaatkan kepemimpinan dan sentralitasnya dalam ASEAN untuk lebih menyinkronisasi kepentingan Indonesia dengan Pasifik Selatan. Ketidakterlibatan Indonesia dalam persaingan AS dengan China di Indo-Pasifik dapat menjadi peluang untuk berperan strategis, mengingat negara-negara Pasifik Selatan juga tidak ingin terbawa dalam arus persaingan geopolitik global. Inisiatif Indonesia, seperti *Pacific Elevation*, *Indonesia-South Pacific Forum*, dan *Indonesia-Pacific Forum for Development* merefleksikan komitmen Indonesia untuk berperan lebih asertif.

Referensi

- BAPPENAS. (2011). *Republik Indonesia laporan studi kerja sama selatan-selatan (draf grand design dan cetak biru)*. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).
- BAPPENAS. (2020, March 12). Bappenas dorong pembangunan inklusif melalui kerja sama selatan-selatan dan triangular [Press release]. Retrieved from <https://bappenas.go.id/id/berita/bappenas-dorong-pembangunan-inklusif-melalui-kerja-sama-selatan-selatan-dan-triangular>
- BAPPENAS. (2024, January 16). Minister suharso emphasizes the role of south-south and triangular partnerships to address global uncertainty [Press release]. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id/en/berita/menteri-suharso-ungkap-peran-kerja-sama-selatan-dan-triangular-untuk-atasi-ketidakpastian-global-QSGJf>

- Bergin, A., Brewster, D., & Bachhawat, A. (2019). *Ocean horizons. strengthening maritime security in Indo-Pacific Island States*. Australian Strategic Policy Institute (ASPI).
- Bernard, L., Petterson, M., Schofield, C., & Kaye, S. (2021). Securing the limits of large ocean states in the pacific: Defining baselines limits and boundaries amidst changing coastlines and sea level rise. *Geosciences*, 11(394), 1–20. Doi:<https://doi.org/10.3390/geosciences11090394>
- BPPK. (2016). *Kerja sama selatan-selatan sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional, BPPK, Kementerian Luar Negeri.
- Buiney, M. E., & Wambrauw, M. S. F. (2024). Indonesia's interests in the pacific region. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 4(3), 376–390. Doi:<https://doi.org/10.55927/mudima.v4i3.8028>
- Chan, N. (2018). “Large Ocean States”: Sovereignty, small islands, and marine protected areas in global oceans governance. *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, 24(4), 537–555. Doi:<https://doi.org/10.1163/19426720-02404005>
- Choong, W. (2019). The return of the Indo-Pacific strategy: An assessment. *Australian Journal of International Affairs*, 73(5), 415–430. Doi:10.1080/10357718.2019.1639134
- Darmawan, A. R. (2022, September 13). Why Indonesia's engagement with Pacific countries matters. *The Interpreter*. Retrieved from <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/why-indonesia-s-engagement-pacific-countries-matters>
- Dayant, A., Duke, R., De Gorostiza, G., & Rajah, R. (2023). *Lowy Institute Pacific Aid Map. 2023 Key Finding Report*. Sydney, Australia: Lowy Institute.
- DFAT. (n.d.). *Australia and the Pacific. Supporting Sustainable Oceans and Livelihood*. <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/supporting-sustainable-oceans-and-livelihoods.pdf>
- Engel, S. (2019). South–south cooperation in Southeast Asia: From Bandung and Solidarity to Norms and Rivalry. *Journal of current Southeast Asian affairs*, 38(2), 218–242. Doi:10.1177/1868103419840456
- Faizasyah, T. (2019, March 30). Indonesian diplomacy: Finding the right balance. *The Jakarta Post*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/03/30/indonesia-foreign-policy-indo-south-pacific.html>

- Fathullah, M. (2018). *Dari Look East ke Act east : Arti penting perubahan kebijakan luar negeri india terhadap negara-negara Asia Tenggara*. (Bachelor Thesis). Airlangga University.
- Firmansyah, R. H. (2019). *Kepentingan Indonesia dalam meningkatkan status keanggotaannya di melanesian spearhead group (msg) menjadi associated member tahun 2015*. (Bachelor Thesis). Brawijaya University.
- Goh, D. L. (2023). Climate change and geopolitics in the blue pacific. *RSIS Commentary*, (177), 1–4.
- Gray, K., & Gills, B. K. (2016). South–South cooperation and the rise of the Global South. *Third World Quarterly*, 37(4), 557–574. Doi:10.1080/01436597.2015.1128817
- Gutu, I. (2016). The transatlantic blue diplomacy. *CES Working Papers*, 8(4), 666–680.
- Haque, M. R. (2021, July 1–4). *Blue diplomacy of Bangladesh: Connectivity, capabilities, and challenges*. Paper presented at the 3rd International Conference on Research in Business, Management, and Finance.
- Harrath, N. (2019, April 3). Diplomats dive into the world of blue diplomacy. Retrieved from <https://www.clingendael.org>
- Hutagalung, S. (2024, April 25). Navigating Indonesia's relations in South Pacific for 2024 – OpEd. *Eurasia Review*. Retrieved from https://www.eurasiareview.com/25042024-navigating-indonesias-relations-in-south-pacific-for-2024-oped/#google_vignette
- IndonesianAid. (2023). *Laporan kinerja tahun 2023. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional*. <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/api/Medias/99a96a3e-4a57-4dfd-8099-12ecb3b9a4de>
- Indrawati, I., & Nugroho, A. Y. (2019). Penerapan prinsip politik luar negeri Indonesia melalui diplomasi maritim [The Implementation of Indonesian Foreign Policy through Maritime Diplomacy]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 10(20), 14–26. Doi:<http://dx.doi.org/10.19166/verity.v10i20.1462>
- Islam, M. S. (2022). The blue economy diplomacy of Bangladesh: Concepts, contexts and practices1. *Journal of Bangladesh and Global Affairs*, 01(02), 35–64. doi:<https://doi.org/10.55875/jbga.bd.oct22.002>
- Kabutaulaka, T. (2020, January 13). Indonesia's "Pacific elevation": Elevating what and who? *Griffith Asia Insights*. Retrieved from <https://blogs.griffith.edu.au/asiainsights/indonesias-pacific-elevation-elevating-what-and-who/>

- Khoirunissa, L., & Aryani, M. I. (2021). Diplomasi Maritim Indonesia dalam perumusan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 3(2), 44–70. doi:<https://doi.org/10.25077/fetrian.3.2.44-70.2021>
- KLHKRI. (2018, March 13–15). *NDC Indonesia and Its Implementation Strategy*. https://sustainabledevelopment.un.org/content/unosd/documents/390902_PL5_Presentation%20Mataerial_Yulia%20Suryanti.pdf
- KLNRI. (2013, February 28). Laut China Selatan [Press release]. https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_lainnya/laut-china-selatan
- KLNRI. (2019, August 16). Indonesia perkuat kerja sama perubahan iklim dengan pasifik pada KTT PIF ke-50 di Tuvalu [Press release]. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/533/berita/indonesia-perkuat-kerja-sama-perubahan-iklim-dengan-pasifik-pada-ktt-pif-ke-50-di-tuvalu>
- KLNRI. (2021, October 27). Speech by the minister of foreign affairs of the republic of Indonesia during the opening ceremony of pacific exposition on 27 October 2021 titled it's time for the pacific, pacific exposition 2021. Pemulihan Ekonomi [Press release]. <https://kemlu.go.id/wellington/id/news/17036/opening-pacific-exposition-2021-its-time-for-the-pacific-pacific-exposition-2021-upaya-pemulihan-ekonomi>
- KLNRI. (2022, December 7). Press briefing Menlu RI Indonesia Pacific forum for development (IPFD) Bali, 7 Desember 2022 [Press release]. https://kemlu.go.id/portal/id/read/4231/siaran_pers/press-briefing-menlu-ri-indonesia-pacific-forum-for-development-ipfd-bali-7-desember-2022
- KPEKRI. (2023, October 8). Press release AIS forum summit 2023: AIS forum realizes innovative solution for sustainable future of Ocean [Press release]. <https://kemenparekraf.go.id/en/articles/press-release-ais-forum-summit-2023-ais-forum-realizes-innovative-solution-for-sustainable-future-of-ocean>
- KPEKRI. (2023, October 10). Siaran pers KTT AIS forum 2023: Daftar kepala negara dan delegasi yang menghadiri KTT AIS forum 2023 [Press release]. <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-ktt-ais-forum-2023-daftar-kepala-negara-dan-delegasi-yang-menghadiri-ktt-ais-forum-2023>

- KSPRI. (2023). *Laporan kinerja (LK) sekretariat kantor staf presiden tahun anggaran 2023*. https://ksp.go.id/wp-content/uploads/2024/07/Laporan-Kinerja-2023_s.pdf
- Kusumaningprang, R. M. (2017). The roots and evolution of Indonesia's middle power activism. *The Indonesian Quarterly*, 45(2), 152–179.
- Marsudi, R. L. P. (2019, March 21). New era of Indonesia-South Pacific engagement. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/03/21/new-era-of-indonesia-south-pacific-engagement.html>
- MFAPRC. (2022, May 24). Fact sheet: Cooperation between China and Pacific Island countries [Press release]. Retrieved from https://www.mfa.gov.cn/eng/zy/gb/202405/t20240531_11367460.html
- Morgan, W. (2020). Oceans apart? considering the Indo-Pacific and the Blue Pacific. *Security Challenges*, 16(1), 44–64.
- Mubah, A. S. (2019). Indonesia's double hedging strategy toward the United States-China competition: Shaping regional order in the Indo-Pacific? *Issues and studies - Institute of International Relations*, 55(4), 1940007. Doi:10.1142/S1013251119400071
- Nugrahantya, A. S. (2021). *Pacific elevation 'engagement': Strategi Indonesia terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dalam menghentikan gerakan separatis di Papua Barat*. (Bachelor Thesis). Diponegoro University.
- OECD. (2016). *Annual report of Indonesia's South-South and triangular cooperation (SSTC) 2016*. <https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12315719.pdf>
- Pamasiwi, R. M., & Arsyani, N. R. (2019). *Beyond Indonesia's sustainable movement in South Pacific area: Study case on pilot projects for Timor Leste and Fiji*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Indonesia (UI).
- Pohl, B., Carius, A., Conca, K., Dabelko, G., Kramer, A., Michel, D., Schmeier, S., Swain, A., & Wolf, A. (2014). *The rise of hydro-diplomacy. Strengthening foreign policy for transboundary waters*. German Federal Foreign Office in cooperation with Adelphi
- Pramudyani, Y. D. (2023, October 11). Indonesia ajak negara AIS Forum bersama hadapi tantangan global. *Antara News*. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/3767418/indonesia-ajak-negara-ais-forum-bersama-hadapi-tantangan-global>

- Prasetya, D. M., & Estriani, H. N. (2018). Diplomasi maritim Indonesia dalam Indian Ocean rim association (IORA): Peluang dan tantangan. *Insignia: Journal of International Relations*, 5(2), 96–108. doi:<https://doi.org/10.20884/1.ins.2018.5.2.1390>
- Prasetyo, H., & Zahidi, M. S. (2022). Diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan dalam rangka menjaga kedaulatan Papua. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 5(02), 15–22.
- Pugu, M. R. (2024). Era baru kemitraan Indonesia-Pasifik. Mungkinkah Papua menjadi hub dalam kerangka diplomasi Indonesia di Pasifik. *Journal of Syntax Literate*, 9(5). Doi:10.36418/syntax-literate.v9i5.15342
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika. (2019). Connecting the Connectivity in the Indo-Pacific: Indian Ocean and Rim Chapter. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri.
- Rijal, N. K. (2019). Smart maritime diplomacy: Diplomasi maritim Indonesia menuju poros maritim dunia. *Jurnal Global & Strategis*, 13(1), 63–78. Doi:<https://doi.org/10.20473/jgs.13.1.2019.63-78>
- Rinaldi, P. N. (2023, August 12). The vital role of south-south cooperation and its importance for the summit of the future. *Global Governance Forum*. Retrieved from <https://globalgovernanceforum.org/vital-role-south-south-cooperation-importance-summit-of-the-future/>
- Robledo, C. (2015). New donors, same old practices? south-south cooperation of Latin American emerging donors. *Journal of the Global South*, 2(1), 3. doi:10.1186/s40728-014-0008-0
- Rony, T. K. (2022, April 16). Our Ocean Conference 2022: Indonesia komitmen lindungi laut dari kerusakan. *Liputan 6*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/global/read/4939884/our-ocean-conference-2022-indonesia-komitmen-lindungi-laut-dari-kerusakan>
- Salman, A. (2015). *Blue diplomacy: Transboundary water governance from a foreign policy lens. Policy Brief*. Heinrich Böll Stiftung.
- Santarita, J. (2002). Southwest Pacific dialogue: Indonesia's newest leverage in the Asia Pacific. *Asian Studies*, 38(2), 121–135.
- Sari, L. N. (2022, June 1). Diplomasi Indonesia kepada negara-negara berkembang melalui official development assistance (ODA). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Retrieved from <https://setkab.go.id/diplomasi-indonesia-kepada-negara-negara-berkembang-melalui-official-development-assistance-oda/>

- Storey, V. (2024). What is the “Blue Pacific” and why is it important? Retrieved from <https://www.pln.com.au/single-post/what-is-the-blue-pacific-and-why-is-it-important>
- TG. (2022, February 8). World leaders descend on France for ocean summit as Macron puts spotlight on seas. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/08/blue-diplomacy-france-summit-puts-worlds-spotlight-on-oceans>
- Trinidad, D. D. (2014). South-South Cooperation in Southeast Asia and the Role of Japan. *VRF Series*, (489), 1–89.
- UNCCS. (n.d.). *Catalysing the implementation of nationally determined contributions in the context of the 2030 agenda through south-south cooperation*. https://unfccc.int/files/resource_materials/application/pdf/ssc_ndc_report.pdf
- UNDP. (2022). *Pacific SIDS. Blue Economy Initiative. Building Sustainable and Resilient Ocean Futures for Pacific SIDS*. United Nations Development Program (UNDP).
- UNDP. (2023, June 26). Indonesia meluncurkan sovereign blue bond pertama di dunia yang ditawarkan kepada publik – dengan dukungan UNDP [Press release]. Retrieved from <https://www.undp.org/indonesia/blog/indonesia-luncurkan-sovereign-blue-bond-pertama-di-dunia-yang-ditawarkan-kepada-publik-dengan-dukungan-undp>
- UNSDG. (2023, July 13). Indonesia launches the world’s first publicly offered sovereign blue bond [Press release]. Retrieved from <https://unsdg.un.org/latest/stories/indonesia-launches-world’s-first-publicly-offered-sovereign-blue-bond>
- Wahyudi, N. A. (2021, October 22). Kucurkan bantuan bagi kawasan pasifik US\$18 Juta, RI ingin perkuat perdagangan. *Bisnis.com*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211022/12/1457254/kucurkan-bantuan-bagi-kawasan-pasifik-us18-juta-ri-ingin-perkuat-perdagangan>
- Wange, H. (2023, August 31). Indonesia’s commitment to the pacific needs to go beyond rhetoric. *The Diplomat*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2023/08/indonesias-commitment-to-the-pacific-needs-to-go-beyond-rhetoric/>
- Wardhani, B. (2023). From Jakarta to Oceania: Indonesia’s cultural diplomacy with the South Pacific. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 10(1), 47–64. Doi:10.1177/23477970231152011

- Wardhani, B., & Dugis, V. (2020). Interpreting Indonesia's "Look East" Policy: The Security Dimension of Foreign Aid. *Issues & Studies*, 56(03), 2040010. Doi:10.1142/s101325112040010x
- Wati, V. O., Apresian, S. R., & Dewi, E. A. (2021). Indonesia's foreign policy in pacific island countries during Joko Widodo era 2014–2019: An adaptive action? *Global & Strategis*, 15(1), 1–24. doi:https://doi.org/10.20473/jgs.15.1.2021.1-24
- WB. (2023). *Indonesia. Laporan iklim dan pembangunan negara*. World Bank.
- Webb-Gannon, C., & Elmslie, J. (2014). MSG headache, West Papuan headache? Indonesia's Melanesian foray. *Asia Pacific Journal: Japan Focus*, 12(47), 3-1-3-23.
- Wyeth, G. (2028, October 30). Paying attention to the blue pacific. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2018/10/paying-attention-to-the-blue-pacific/#:~:text=The%20concept%20of%20the%20%20Blue%20Pacific%20is%20an,%20large%20ocean%20states%2C%20rather%20than%20%20small%20island%20states.>
- Yadav, A. (2023). Navigating the Blue Diplomacy: Indo-Pacific Oceans and the Geopolitical Chessboard of India and China. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, 5(6), 1–8. Doi:10.36948/ijfmr.2023.v05i06.11472
- Yudilla, A., & Amri, P. (2020). Analisa SWOT kebijakan poros maritim global di wilayah Kepulauan Riau. *Nation State: Journal of International Studies*, 3(2), 230–240. Doi:https://doi.org/10.24076/NSJIS.2020v3i2.360